

Epistemologi Keberkahan dalam Pendidikan Pesantren: Tinjauan Kritik Feodalisme

Uchik Rini Qomaria¹, Muhammad Husni²

¹ Universitas Al-Qolam Malang, Indonesia

² Universitas Al-Qolam Malang, Indonesia

Corresponding Author:

Uchik Rini Qomaria, Universitas Al-Qolam Malang, Indonesia

Email: uchikriniqomaria25@pasca.alqolam.ac.id

Abstract

This study examines the epistemology of blessing (barakah) in pesantren education and its implications for the kyai–santri relationship, while addressing accusations of feudalism often directed at these institutions. Pesantrens not only transmit knowledge but also cultivate moral and ethical awareness in students through adab (etiquette), khidmah (service), and scholarly sanad (chains of transmission). The blessing of knowledge serves as an epistemic parameter, assessing the quality of learning based on moral, spiritual, and social benefit rather than mere accumulation of information. Kyai authority derives from scholarly mastery, moral integrity, and social legitimacy, not structural domination, while students act as active agents in internalizing knowledge and values. Feudalism critiques, when interpreted through modern egalitarian paradigms, risk misrepresenting these pedagogical relations. This study highlights that the epistemology of blessing provides an alternative framework to understand pesantren education from within, integrating cognitive, ethical, and transcendental dimensions. The findings emphasize the contemporary relevance of pesantren and the importance of approaches that respect values, tradition, and the continuity of knowledge

Keywords: Epistemology of Blessing, Pesantren, Kyai-Santri, Moral Authority, Islamic Education, Feudalism

Abstrak

Penelitian ini membahas epistemologi keberkahan dalam pendidikan pesantren dan implikasinya terhadap relasi kiai–santri, sekaligus menanggapi tuduhan feodalisme yang kerap diarahkan pada institusi ini. Pesantren tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk kesadaran etis dan moral santri melalui adab, khidmah, dan sanad keilmuan. Keberkahan ilmu menjadi parameter epistemik yang menilai kualitas pengetahuan berdasarkan manfaat moral, spiritual, dan sosial, bukan sekadar kuantitas informasi. Otoritas kiai bersumber dari penguasaan ilmu, integritas moral, dan legitimasi sosial, bukan dominasi struktural, sementara santri diposisikan sebagai subjek aktif dalam internalisasi ilmu dan nilai. Kritik feodalisme, jika dibaca melalui paradigma modern egaliter, berisiko salah menafsirkan struktur relasi pedagogis ini. Kajian ini menegaskan bahwa epistemologi keberkahan menyediakan kerangka alternatif untuk memahami pendidikan pesantren secara internal, mengintegrasikan dimensi kognitif, etis, dan transendental. Temuan ini menekankan relevansi pesantren dalam pendidikan Islam kontemporer dan perlunya pendekatan yang sensitif terhadap nilai, tradisi, dan keberlanjutan keilmuan.

Kata kunci: Epistemologi Keberkahan, Pesantren, Kiai–Santri, Otoritas Moral, Pendidikan Islam, Feodalisme

PENDAHULUAN

Pesantren merupakan salah satu institusi pendidikan Islam tertua di Indonesia yang berkembang seiring dengan proses Islamisasi Nusantara dan memiliki kontribusi penting dalam transmisi serta reproduksi pengetahuan keislaman. Keberadaan pesantren tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses pembelajaran agama, tetapi juga sebagai ruang pembentukan karakter, adab, spiritualitas, dan tradisi intelektual Islam. Dalam perkembangannya, pesantren membangun sistem pendidikan yang khas melalui pengajaran kitab-kitab turats, tradisi sanad keilmuan, pembiasaan ibadah, keteladanan kiai, serta kehidupan kolektif yang berlangsung secara intensif. Dhofier (2011) menjelaskan bahwa kiai memiliki posisi sentral dalam struktur pesantren, baik sebagai pengajar maupun sebagai figur yang menjadi rujukan moral dan spiritual bagi santri. Dengan demikian, hubungan pendidikan di pesantren tidak hanya berlangsung dalam bentuk transfer pengetahuan, tetapi juga melalui proses transmisi nilai, adab, keteladanan, dan orientasi spiritual.

Salah satu konsep yang memiliki posisi penting dalam tradisi pendidikan pesantren adalah keberkahan atau barakah. Keberkahan tidak sekadar dipahami sebagai tambahan manfaat dari ilmu yang diperoleh, tetapi berkaitan dengan keyakinan bahwa ilmu akan memberikan kemanfaatan apabila diperoleh melalui cara yang benar, disertai adab, keikhlasan, penghormatan kepada guru, dan pengamalan dalam kehidupan. Dalam tradisi pesantren, pencarian ilmu karena itu tidak semata-mata diarahkan pada penguasaan pengetahuan, ijazah, atau pencapaian akademik, tetapi juga pada terbentuknya pribadi yang berilmu, beradab, dan bermanfaat. Konsepsi tersebut menunjukkan bahwa pesantren memiliki orientasi epistemologis yang mempertemukan dimensi intelektual, moral, dan spiritual dalam proses pendidikan.

Penelitian mengenai keberkahan dalam tradisi pesantren menunjukkan bahwa konsep tersebut bukan sekadar istilah keagamaan yang bersifat normatif, tetapi telah menjadi bagian dari konstruksi sosial dan budaya pendidikan pesantren. Syarif dan Gaffar (2025), misalnya, menemukan bahwa barokah diinternalisasikan melalui tradisi, pemahaman keagamaan, tindakan sosial, serta keteladanan kiai. Dalam penelitian tersebut, barokah dipahami santri sebagai kekuatan spiritual yang memberikan ketenangan, motivasi dalam menuntut ilmu, dan dorongan untuk berkontribusi kepada masyarakat. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa barokah berfungsi sebagai daya tarik, modal sosial, dan fondasi moral pesantren. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberkahan memiliki dimensi sosial-pedagogis yang penting dalam kehidupan pesantren, bukan semata-mata dimensi teologis.

Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian tentang nilai-nilai barokah dalam pendidikan agama Islam di Pesantren Zainul Hasan 2 Tambelang Probolinggo. Penelitian tersebut

menunjukkan bahwa nilai barokah diperoleh melalui proses ketaatan, pengabdian, dan hubungan antara kiai dengan santri. Barokah dipahami sebagai sesuatu yang ditransmisikan melalui hubungan pendidikan dan pengabdian antara guru dan murid. Dengan demikian, praktik penghormatan dan pengabdian kepada kiai dalam tradisi pesantren memiliki makna spiritual yang tidak dapat dilepaskan dari orientasi pendidikan pesantren.

Konsep keberkahan tersebut kemudian berkaitan erat dengan posisi kiai sebagai sumber otoritas keilmuan dan moral. Dalam kehidupan pesantren, kiai tidak hanya menjalankan fungsi sebagai pengajar, tetapi juga sebagai figur teladan yang menjadi rujukan dalam perilaku dan kehidupan keagamaan santri. Penelitian Wibowo (2020) tentang etika santri kepada kiai berdasarkan *Ta'lim al-Muta'allim* menunjukkan bahwa penghormatan santri kepada kiai berkaitan dengan konsep *ta'dzim*, *tabarukan*, dan *ngalap barokah*. Kiai diposisikan bukan hanya sebagai sumber pengetahuan, tetapi juga sebagai teladan moral dalam proses pendidikan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa relasi guru dan murid dalam pesantren memiliki dimensi etis dan spiritual yang lebih luas dibandingkan relasi instruksional dalam pengertian pendidikan modern.

Meskipun demikian, struktur relasi yang menempatkan kiai pada posisi sentral juga melahirkan kritik, khususnya ketika dilihat dari perspektif relasi kuasa. Relasi kiai dan santri yang ditandai oleh penghormatan, kepatuhan, dan ketundukan dapat dipahami sebagai hubungan hierarkis atau patron-klien. Penelitian Ma'arif (2010) menunjukkan bahwa pola patron-klien telah menjadi salah satu karakter hubungan kiai dan santri dalam tradisi pesantren. Relasi tersebut memperkuat legitimasi otoritas dan karisma kiai serta memengaruhi pola partisipasi santri dan masyarakat dalam kehidupan pesantren. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa relasi kiai-santri memang memiliki struktur hierarkis yang perlu dianalisis secara kritis, bukan sekadar diterima sebagai hubungan pedagogis yang bebas dari persoalan kekuasaan.

Kajian yang lebih mutakhir juga memperlihatkan bahwa relasi tersebut tidak bersifat tunggal dan sederhana. Penelitian Achmadin *et al.* (2024) mengenai relasi kiai dan santri di Jawa Timur menemukan bahwa hubungan tersebut memang memiliki hierarki yang kuat dan menempatkan kiai sebagai figur dengan otoritas besar. Namun, penelitian tersebut juga menemukan adanya proses negosiasi dan resistensi santri terhadap otoritas kiai. Artinya, santri tidak selalu berada dalam posisi pasif, melainkan dapat melakukan negosiasi terhadap identitas, ruang, dan relasi kekuasaan yang berlangsung di lingkungan pesantren. Temuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan kiai-santri perlu dipahami sebagai relasi sosial yang dinamis, bukan sekadar hubungan satu arah antara pihak yang berkuasa dan pihak yang dikuasai.

Hal serupa terlihat dalam penelitian Hanik (2024) mengenai relasi kiai dan santri di Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek R2 Krapyak Yogyakarta. Penelitian tersebut menemukan adanya hierarki yang jelas antara pengasuh, pengurus, dan santri. Namun, otoritas pengasuh dalam konteks yang diteliti juga berfungsi untuk mengorganisasi dan mendidik santri dalam rangka membentuk akhlak. Dengan demikian, keberadaan hierarki tidak secara otomatis menunjukkan bahwa seluruh relasi tersebut bersifat dominatif. Makna dan fungsi otoritas perlu dilihat berdasarkan konteks, tujuan, praktik, dan nilai yang mendasarinya.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting ketika konsep keberkahan ditempatkan sebagai bagian dari epistemologi pesantren. Dalam tradisi keilmuan Islam, ilmu tidak hanya dinilai berdasarkan aspek rasional dan empiris, tetapi juga berdasarkan sumber, cara memperoleh, adab, serta dampaknya terhadap pembentukan manusia. Al-Zarnuji melalui *Ta'lim al-Muta'allim* menempatkan adab terhadap guru, kesungguhan, niat, dan penghormatan terhadap ilmu sebagai bagian penting dalam proses memperoleh ilmu. Sejalan dengan itu, Al-Attas (1999) menempatkan *ta'dib* sebagai konsep fundamental pendidikan Islam, yaitu proses pembentukan manusia yang mengenali dan menempatkan sesuatu secara tepat berdasarkan tatanan ilmu dan nilai. Dalam kerangka tersebut, keberkahan dapat dipahami sebagai bagian dari orientasi epistemologis yang menghubungkan ilmu dengan adab, amal, dan transformasi spiritual.

Penelitian mutakhir mengenai epistemologi pesantren juga memperlihatkan hubungan antara otoritas keilmuan, sanad, dan keberkahan. Masfufah dan Husni (2026) mengidentifikasi tiga pilar epistemologi pesantren, yaitu kiai sebagai otoritas personal, kitab kuning sebagai otoritas tekstual, dan dimensi spiritual sebagai bagian dari proses pembentukan otoritas keilmuan serta akhlak santri. Penelitian tersebut menempatkan sanad dan transmisi keilmuan sebagai unsur yang memberikan legitimasi terhadap pengetahuan sekaligus berkaitan dengan konsep barakah. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa otoritas kiai dalam pesantren tidak hanya dapat dijelaskan melalui perspektif kekuasaan sosial, tetapi juga melalui mekanisme epistemik dan spiritual yang khas.

Namun demikian, perspektif kritis tetap diperlukan karena otoritas keagamaan dapat memiliki konsekuensi yang berbeda-beda dalam praktik pendidikan. Penelitian Nasith *et al.* (2025) mengenai *pesantren, piety, and power* menunjukkan bahwa otoritas kiai dalam beberapa pesantren tidak hanya berkaitan dengan pengajaran agama, tetapi juga meliputi kepemimpinan, kurikulum, disiplin, suksesi, dan tata kelola kelembagaan. Penelitian tersebut mengidentifikasi beberapa model patronase dalam tata kelola pesantren serta menunjukkan adanya tantangan berupa ketergantungan pada suksesi, lemahnya profesionalisasi tata kelola, dan persoalan keseimbangan kelembagaan. Temuan ini menunjukkan bahwa otoritas keagamaan dapat

berfungsi sebagai kekuatan pendidikan sekaligus memiliki konsekuensi kelembagaan yang perlu dikaji secara kritis.

Kajian mengenai feodalisme dalam pesantren juga mulai berkembang secara lebih eksplisit. Pamungkas (2026), misalnya, mengkaji relasi kuasa dan hierarki sosial di pesantren dengan memusatkan perhatian pada praktik yang disebut sebagai feodalisme dan fenomena *gus-gusan*. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa struktur hierarkis pesantren berkaitan dengan akumulasi modal simbolik, sosial, dan budaya serta dipertahankan melalui adab dan tradisi *ta'zim*. Di sisi lain, penelitian tersebut juga mengidentifikasi kecenderungan patrimonial yang muncul melalui kepemimpinan turun-temurun, kontrol simbolik, dan kepatuhan. Temuan ini memperlihatkan bahwa konsep feodalisme dalam pesantren tidak dapat dipahami secara sederhana, tetapi perlu dibedakan antara otoritas keilmuan, otoritas moral, patronase, patrimonialisme, dan dominasi.

Dengan demikian, terdapat dua kecenderungan dalam penelitian terdahulu. Pertama, penelitian mengenai keberkahan lebih banyak menempatkan *barakah* sebagai nilai religius, modal sosial, orientasi spiritual, atau mekanisme internalisasi nilai dalam kehidupan pesantren. Kedua, penelitian mengenai relasi kiai-santri lebih banyak menggunakan perspektif patron-klien, relasi kuasa, otoritas, dan hierarki sosial. Kedua kelompok penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting, tetapi kajian yang secara khusus mempertemukan epistemologi keberkahan dengan kritik terhadap feodalisme dalam pendidikan pesantren masih relatif terbatas. Dengan kata lain, masih terdapat ruang kajian untuk menjelaskan bagaimana keyakinan terhadap keberkahan memengaruhi cara pesantren memahami ilmu, guru, murid, adab, kepatuhan, dan otoritas, sekaligus bagaimana relasi tersebut dapat dibedakan dari praktik dominasi atau feodalisme.

Kesenjangan tersebut penting karena penggunaan konsep feodalisme secara langsung terhadap relasi kiai-santri berpotensi menyederhanakan fenomena pendidikan pesantren. Di satu sisi, penghormatan dan kepatuhan kepada kiai memang dapat membentuk struktur hierarkis dan dalam kondisi tertentu dapat beririsan dengan relasi patronase atau dominasi. Di sisi lain, dalam kerangka epistemologi pesantren, penghormatan tersebut juga dapat dipahami sebagai bagian dari *ta'zim*, adab, sanad, keteladanan, dan pencarian keberkahan ilmu. Oleh karena itu, persoalannya bukan sekadar apakah pesantren bersifat feodal atau tidak, melainkan bagaimana relasi otoritas tersebut dibentuk, dilegitimasi, dipraktikkan, dan dimaknai oleh pelaku pendidikan pesantren.

Perspektif tersebut memungkinkan penelitian ini mengambil posisi yang lebih kritis sekaligus proporsional. Feodalisme tidak cukup dipahami hanya berdasarkan keberadaan hierarki, sebab hierarki dapat ditemukan dalam berbagai organisasi pendidikan tanpa selalu

berarti dominasi. Sebaliknya, analisis perlu memperhatikan sumber legitimasi otoritas, bentuk kepatuhan, ruang dialog dan kritik, mekanisme pewarisan otoritas, serta tujuan yang hendak dicapai melalui relasi tersebut. Dengan pendekatan demikian, konsep keberkahan dapat dianalisis bukan hanya sebagai keyakinan spiritual, tetapi sebagai epistemologi yang memengaruhi konstruksi pengetahuan, otoritas guru, posisi santri, dan praktik pendidikan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memandang penting untuk mengkaji epistemologi keberkahan dalam pendidikan pesantren sekaligus menempatkannya dalam dialog kritis dengan konsep feodalisme. Penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga persoalan utama, yaitu: (1) bagaimana konsep keberkahan dikonstruksi dalam epistemologi pendidikan pesantren; (2) bagaimana epistemologi keberkahan membentuk relasi kiai dan santri dalam proses pendidikan; dan (3) bagaimana relasi tersebut dapat dianalisis secara kritis dalam kaitannya dengan konsep feodalisme. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberkahan sebagai bagian dari epistemologi pendidikan pesantren, menjelaskan pengaruhnya terhadap konstruksi otoritas dan relasi pedagogis kiai-santri, serta memberikan pembacaan kritis terhadap penggunaan konsep feodalisme dalam memahami tradisi pendidikan pesantren.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian epistemologi pendidikan Islam dengan memperluas pembahasan mengenai hubungan antara ilmu, adab, otoritas, sanad, dan keberkahan. Secara akademik, penelitian ini juga diharapkan dapat mempertemukan perspektif internal pesantren dengan pendekatan kritis terhadap relasi kuasa, sehingga pendidikan pesantren tidak hanya dipahami berdasarkan kerangka modern dari luar, tetapi juga berdasarkan logika epistemologis dan kebudayaan yang berkembang dari dalam tradisi pesantren itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*), yang memungkinkan kajian literatur secara mendalam dan interpretatif terhadap fenomena epistemologi keberkahan dalam pendidikan pesantren. Pendekatan kualitatif sesuai dengan prinsip yang dikemukakan oleh Notoatmodjo bahwa penelitian jenis ini berfokus pada pemahaman fenomena sosial dalam konteksnya sendiri, serta menempatkan kajian pustaka sebagai sumber data utama yang kredibel (Notoatmodjo, 2010). Selain itu, Moleong (2019) menegaskan bahwa analisis kualitatif melibatkan interpretasi makna dari teks dan wacana dalam konteks sosial, sehingga relevan dengan penggunaan analisis tematik dan analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*) dalam penelitian ini.

Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi karya-karya klasik Islam yang membahas adab dan pendidikan, seperti *Ta'lim al-Muta'allim*

karya al-Zarnuji, sedangkan sumber sekunder mencakup literatur kepesantrenan, artikel jurnal ilmiah, dan karya ilmiah yang relevan dengan tradisi pendidikan Islam dan isu feodalisme. Analisis data dilakukan melalui pendekatan tematik-konseptual untuk mengidentifikasi konsep keberkahan dalam literatur, serta analisis wacana kritis untuk menelaah konstruksi makna keberkahan dan kritik terkait feodalisme terhadap relasi kiai-santri. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menangkap makna epistemologis sekaligus struktur sosial dalam praktik pendidikan pesantren, tanpa mengurangi konteks historis dan kultural yang melekat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Keberkahan dalam Tradisi Pendidikan Islam

Keberkahan merupakan salah satu konsep kunci dalam khazanah Islam yang memiliki kedalaman makna teologis sekaligus implikasi praktis dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Secara etimologis, istilah *berkah* berasal dari bahasa Arab *al-barakah*, yang berakar dari kata *baraka-yabruku* dengan makna tetap (*al-tsubūt*), menetap, dan bertambahnya kebaikan (*al-ziyādah fī al-khayr*) (Al-Rāghib al-Aṣḥānī, 2009). Dalam Kamus Al-Munawwir (1997), *barakah* diartikan sebagai “bertambahnya kebaikan, kebahagiaan, dan manfaat yang bersifat langgeng”. Sementara itu, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* mendefinisikan *berkah* sebagai “karunia Tuhan yang membawa kebaikan bagi kehidupan manusia”, yang menunjukkan adanya reduksi makna spiritual menjadi pengertian umum. Ibn Manẓūr (2003) menjelaskan bahwa keberkahan menunjuk pada kondisi kebaikan yang bersifat langgeng dan produktif, sehingga manfaatnya tidak bersifat sesaat. Pemaknaan ini menegaskan bahwa keberkahan tidak identik dengan kelimpahan material, melainkan dengan kualitas kebaikan yang berkelanjutan. Dalam bentuk nomina abstraknya, istilah *keberkahan* menunjukkan keadaan atau kualitas yang mengandung nilai *berkah* secara konsisten, sehingga ia dipahami sebagai kondisi normatif yang menyertai suatu aktivitas atau proses, bukan sekadar peristiwa tunggal.

Dalam Al-Qur’an, keberkahan dipahami sebagai anugerah ilahiah yang melampaui ukuran material dan rasionalitas teknis. Allah menegaskan bahwa keberkahan merupakan konsekuensi dari iman dan ketakwaan, sebagaimana dinyatakan dalam QS. al-A’rāf [7]: 96:

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

Ayat ini menunjukkan bahwa keberkahan tidak hadir sebagai hasil mekanisme struktural semata, melainkan sebagai limpahan nilai dari relasi etis-spiritual manusia dengan Allah. Dalam konteks epistemologi pendidikan Islam, keberkahan menempatkan ilmu sebagai *khayr*

yang bertambah (*ziyādat al-khayr*), bukan sekadar akumulasi pengetahuan. Hal ini ditegaskan pula dalam QS. al-Baqarah [2]: 269

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

Allah menyebut *hikmah* sebagai *khayran katsīrā*, yang oleh para ulama dipahami sebagai ilmu yang benar, bermanfaat, dan melahirkan kebijaksanaan dalam amal. Dengan demikian, keberkahan menjadi kategori epistemik yang menentukan kualitas ilmu, bukan kuantitasnya. Pemahaman normatif tersebut diperkuat oleh hadis Nabi yang menegaskan bahwa ilmu tidak dilepaskan dari figur pembawanya dan cara transmisinya. Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بَقْبِضِ الْعُلَمَاءِ (رواه البخاري)

Allah tidak mencabut ilmu secara langsung dari manusia, tetapi dengan mewafatkan para ulama (Al-Bukhārī, 2002). Hadis ini menunjukkan bahwa keberkahan ilmu terjaga melalui kesinambungan ulama dan relasi pedagogis yang hidup, bukan melalui transfer informasi yang impersonal. Demikian pula sabda Nabi ﷺ:

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ (رواه مسلم)

Nabi ﷺ bersabda bahwa siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, maka akan diberi pemahaman yang mendalam dalam agama. Hadits ini menegaskan bahwa pemahaman agama merupakan tanda kebaikan dan keberkahan dari Allah, bukan semata hasil kecerdasan intelektual. Keberkahan ilmu, dengan demikian, sangat ditentukan oleh niat, adab, dan orientasi moral, sebagaimana ditegaskan dalam hadis *innamā al-a'mālu bin-niyyāt*. Dalam praktik pendidikan pesantren, kerangka normatif tersebut mewujudkan secara konkret melalui mekanisme sanad keilmuan, khidmah, dan *ta'zīm* kepada kiai. Sanad berfungsi sebagai struktur epistemik yang menjamin keabsahan sekaligus keberkahan ilmu melalui kesinambungan transmisi dari guru ke murid hingga sumber otoritatifnya (Dhofier, 2011). Khidmah dipahami sebagai latihan spiritual yang membersihkan niat dan membentuk adab pencari ilmu, sementara *ta'zīm* terhadap kiai dimaknai sebagai penghormatan terhadap ilmu dan nilai-nilai yang dijaganya, bukan sebagai kultus personal. Dengan demikian, praktik khas pesantren tersebut tidak dapat dibaca sebagai ekspresi feodalisme, melainkan sebagai manifestasi dari epistemologi

keberkahan yang menempatkan adab, relasi personal, dan orientasi transendental sebagai prasyarat utama validitas ilmu.

Konsep keberkahan dalam pendidikan Islam menunjukkan bahwa ilmu tidak hanya dinilai dari aspek kognitif, tetapi juga dari kualitas etis dan spiritual yang menyertainya. Keberkahan menjadi fondasi normatif yang mengarahkan tujuan pendidikan Islam pada pembentukan manusia yang beradab dan bertanggung jawab secara moral. Kerangka konseptual ini menjadi pijakan penting untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana keberkahan berfungsi sebagai prinsip epistemologis dalam sistem pendidikan pesantren.

Epistemologi Keberkahan dalam Pendidikan Pesantren

Dalam tradisi pendidikan pesantren, keberkahan berfungsi sebagai prinsip epistemologis yang menentukan legitimasi ilmu. Ilmu tidak dipahami semata-mata sah karena kebenaran rasional atau koherensi metodologisnya, melainkan karena ia diperoleh melalui proses yang beradab, berniat ikhlas, serta terhubung dengan sumber otoritatif keilmuan Islam. Dalam kerangka epistemologi pendidikan Islam, pengetahuan tidak berdiri sebagai entitas netral dan otonom, tetapi selalu terkait dengan orientasi nilai dan tujuan etik-spiritual pencarinya. Oleh karena itu, keberkahan berperan sebagai parameter epistemik yang menilai kualitas ilmu berdasarkan kemanfaatan, transformasi moral, dan keterarahannya pada kebenaran, bukan sekadar pada akumulasi informasi (Al-Ghazālī, 2005).

Berbeda dengan epistemologi modern yang cenderung menekankan objektivitas impersonal dan prosedur rasional formal, epistemologi keberkahan menempatkan subjek pencari ilmu sebagai bagian integral dari validitas pengetahuan itu sendiri. Ilmu dipandang bernilai ketika ia membentuk kesadaran moral dan tanggung jawab spiritual, serta mengantarkan manusia pada pengenalan yang benar terhadap dirinya, masyarakat, dan Tuhan. Kerangka ini menunjukkan bahwa pesantren mengembangkan epistemologi yang memadukan dimensi kognitif, etis, dan transendental secara simultan. Dengan demikian, adab dan sanad bukan sekadar pelengkap pedagogis, melainkan fondasi epistemologis yang menjamin keabsahan dan kebermaknaan ilmu.

Dalam epistemologi keberkahan tersebut, kiai diposisikan sebagai figur epistemik, bukan sebagai penguasa feodal. Otoritas kiai lahir dari pengakuan atas kedalaman ilmu, integritas moral, dan kesinambungan sanad keilmuan yang dimilikinya, bukan dari struktur dominasi atau paksaan sosial. Dalam konteks pesantren, kiai berfungsi sebagai penjaga tradisi keilmuan, penafsir nilai, serta teladan hidup yang memediasi transmisi ilmu dan adab. Otoritas ini bersifat normatif dan persuasif, karena keberlangsungannya bergantung pada kepercayaan dan pengakuan santri, bukan pada kontrol struktural (Dhofier, 2011). Oleh karena itu, hierarki yang tampak dalam relasi pesantren merupakan konsekuensi epistemologis dari penghormatan

terhadap ilmu dan sanad, bukan ekspresi relasi kuasa feodal sebagaimana dipahami dalam paradigma modern (Al-Attas, 1993).

Pemahaman tentang keberkahan dalam pendidikan pesantren juga ditegaskan oleh Wahid (2007), yang menyatakan bahwa keberkahan ilmu diyakini “memancar” dari seorang kiai kepada santrinya melalui proses bimbingan yang berkesinambungan. Keyakinan bahwa pendampingan kiai merupakan syarat penting untuk memperoleh pemahaman agama yang benar membentuk sistem nilai pesantren, di mana santri berupaya meneladani penerapan ajaran agama oleh kiai secara cermat dan konsisten. Namun demikian, Wahid (2007) menegaskan bahwa kiai tidak dipahami sebagai sumber keberkahan itu sendiri, melainkan sebagai perantara dalam proses transmisi nilai dan ilmu, sementara keberkahan tetap merupakan otoritas Tuhan sepenuhnya. Dengan kerangka ini, relasi kiai-santri tidak dapat dimaknai sebagai relasi kuasa personal, melainkan sebagai relasi pedagogis-spiritual yang berorientasi pada internalisasi nilai.

Pandangan tersebut menemukan resonansinya dalam penjelasan para kiai pesantren mengenai indikator ilmu yang berkah. Dalam tulisannya, Fikri (2022) mengutip pandangan Kiai As’ad Syamsul Arifin yang menyebutkan tiga tanda utama ilmu yang berkah pada diri santri, yaitu kejernihan gerak hati, sikap *takzīm* terhadap kitab, serta kesetiaan untuk tidak melupakan guru-gurunya. Sementara itu, Kiai Zamzami Mahrus sebagaimana dikutip dalam sumber populer pesantren menambahkan bahwa salah satu ikhtiar penting dalam mencari keberkahan ilmu adalah menjaga prasangka baik terhadap guru dan menghindari sikap *su’uzan*, karena sikap batin santri diyakini memengaruhi keberterimaan ilmu yang dipelajari (Fajmi, 2022). Penekanan pada dimensi batiniah ini menunjukkan bahwa keberkahan tidak dilekatkan pada struktur hierarkis semata, melainkan pada kualitas relasi etis antara guru dan murid. Dalam konteks pesantren, relasi etis yang menjadi prasyarat keberkahan tersebut terartikulasikan dalam hubungan pedagogis antara kiai dan santri.

Dari perspektif teologis, konsep keberkahan dalam Al-Qur’an menunjukkan bahwa berkah merupakan bentuk aktivitas Tuhan dalam melimpahkan kebaikan, sehingga keberadaannya tidak dapat direduksi menjadi hasil mekanisme sosial atau relasi kuasa manusiawi (Suratno, 2002). Pemahaman ini sejalan dengan pandangan Wahid (2007) yang menempatkan kiai bukan sebagai pemilik kekuasaan sakral atas keberkahan, melainkan sebagai medium sosial dan kultural dalam proses pewarisan ilmu dan nilai. Dalam perspektif sosiologi pengetahuan, posisi kiai tersebut dapat dipahami sebagai hasil konstruksi sosial atas otoritas keilmuan dan moral, sebagaimana dijelaskan oleh Berger dan Luckmann (1990) bahwa realitas sosial dibentuk melalui proses objektivasi dan internalisasi makna. Keberkahan dalam pesantren tidak bersumber dari legitimasi feodal, melainkan dari perjumpaan antara ikhtiar manusia, adab pedagogis, dan kehendak Tuhan.

Sejalan dengan itu, dalam epistemologi keberkahan santri tidak diposisikan sebagai penerima pasif otoritas keilmuan, melainkan sebagai subjek aktif dalam proses pencarian, penghayatan, dan internalisasi ilmu. Keberkahan tidak dipahami sebagai sesuatu yang otomatis diperoleh melalui kedekatan struktural dengan kiai, tetapi sebagai hasil dari ikhtiar epistemik dan spiritual santri itu sendiri. Ikhtiar tersebut diwujudkan melalui kesungguhan belajar (*jiddiyyah*), keikhlasan niat (*ikhhlās*), riyāḍah spiritual, serta komitmen terhadap adab dalam seluruh proses pendidikan. Tradisi pesantren menekankan bahwa ilmu hanya akan “menetap” dan memberi manfaat ketika santri secara aktif membangun kesiapan moral dan spiritualnya sebagai prasyarat penerimaan ilmu (Al-Ghazālī, 2005).

Relasi kiai-santri dalam pesantren, dengan demikian, bersifat dialektis dan partisipatoris. Kiai berperan sebagai penjaga sanad dan teladan epistemik yang mengarahkan nilai serta orientasi ilmu, sementara santri memikul tanggung jawab personal atas proses pembentukan dirinya sebagai pencari ilmu yang beradab dan berorientasi pada keberkahan. Pola relasi ini menunjukkan bahwa otoritas dalam pesantren tidak bersifat statis atau menindas, melainkan dinamis dan edukatif. Struktur relasi tersebut justru memungkinkan terjadinya transmisi ilmu yang bermakna, karena ia bertumpu pada kesadaran etis, bukan kepatuhan struktural semata (Dhofier, 2011). Pola relasi tersebut menjadi landasan penting untuk membaca ulang tuduhan feodalisme terhadap pesantren, yang akan dibahas lebih lanjut pada subbagian berikutnya.

Relasi Kiai-Santri: Antara Otoritas Ilmiah dan Tuduhan Feodalisme

Dalam sejumlah kajian pendidikan modern, relasi kiai-santri di pesantren kerap dibaca melalui kacamata egalitarianisme struktural yang menaruh kecurigaan terhadap segala bentuk hierarki. Kerangka berpikir ini cenderung memaknai hubungan yang asimetris sebagai indikasi dominasi, ketundukan, atau bahkan feodalisme. Akibatnya, pola relasi pedagogis pesantren yang menekankan penghormatan, ketaatan etis, dan kedekatan personal antara guru dan murid sering dipersepsikan sebagai relasi kuasa yang problematis. Pembacaan semacam ini, meskipun berangkat dari semangat emansipatoris, berisiko mengabaikan konteks kultural dan epistemologis di mana relasi tersebut dibentuk dan dijalankan.

Secara konseptual, feodalisme merujuk pada sistem relasi sosial yang ditandai oleh kepemilikan kuasa secara turun-temurun, dominasi struktural, serta ketundukan yang bersifat koersif. Otoritas dalam sistem feodal bersandar pada posisi sosial dan kekuasaan material, bukan pada pengakuan atas kapasitas moral atau intelektual. Dalam kerangka ini, relasi antara pihak yang berkuasa dan yang dikuasai bersifat rigid serta minim ruang partisipasi. Jika definisi ini dijadikan tolok ukur, maka relasi kiai-santri di pesantren sulit disepadankan secara langsung dengan feodalisme, karena tidak berlandaskan pada mekanisme paksaan atau

kepemilikan kuasa, melainkan pada pengakuan normatif terhadap otoritas keilmuan dan keteladanan moral.

Relasi kiai-santri dalam pesantren lebih tepat dipahami sebagai relasi otoritas epistemik, yakni otoritas yang lahir dari penguasaan ilmu, integritas personal, dan kesinambungan sanad keilmuan. Ketaatan santri terhadap kiai tidak bersifat politis atau struktural, melainkan pedagogis dan etis, yang bertujuan menjaga adab serta keberkahan dalam proses belajar. Dalam konteks ini, hierarki bukan dimaksudkan untuk menundukkan, tetapi untuk mengarahkan proses internalisasi nilai dan ilmu secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, penghormatan terhadap kiai merupakan bagian dari etika pencarian ilmu, bukan ekspresi ketimpangan kuasa sebagaimana diasumsikan dalam kerangka feodal. Pandangan ini sejalan dengan refleksi kalangan pesantren yang menegaskan bahwa praktik *ta'zīm* dan kepatuhan santri tidak dapat dilepaskan dari kerangka adab dan keberkahan, bukan logika dominasi.

Kesalahan analisa terhadap pesantren sering kali muncul akibat penggunaan kategori analitis yang tidak lahir dari tradisi yang sedang dikaji. Asad (1986) mengingatkan bahwa konsep-konsep modern yang lahir dari pengalaman sejarah Barat tidak dapat secara serta-merta diterapkan pada praktik keagamaan masyarakat Muslim tanpa mempertimbangkan konteks diskursif dan tradisi internalnya. Dalam kasus pesantren, relasi kiai-santri dibaca dengan paradigma kuasa modern yang menekankan kesetaraan formal, sementara pesantren beroperasi dalam paradigma epistemologi keberkahan yang menempatkan adab, relasi personal, dan orientasi transendental sebagai prasyarat validitas ilmu. Ketidaksesuaian paradigma ini menghasilkan apa yang dapat disebut sebagai *category mistake*, yakni kesalahan dalam menerapkan konsep pada konteks yang tidak tepat.

Dalam perspektif sosiologi, otoritas kiai dapat dipahami sebagai hasil konstruksi sosial yang dibentuk melalui proses legitimasi keilmuan dan internalisasi nilai. Berger dan Luckmann (1990) menjelaskan bahwa realitas sosial, termasuk otoritas dan pengetahuan, terbentuk melalui proses objektivasi, institusionalisasi, dan internalisasi makna. Dengan kerangka ini, otoritas kiai tidak bersifat *given* atau feodal, melainkan dihasilkan dan dipelihara melalui pengakuan kolektif atas kapasitas keilmuan dan moralnya. Dengan demikian, tuduhan feodalisme terhadap pesantren lebih mencerminkan keterbatasan perspektif pembacanya daripada realitas relasi pendidikan yang hidup di dalam pesantren itu sendiri.

Dengan demikian, relasi kiai-santri dalam pesantren tidak dapat dipahami secara memadai jika hanya dibaca melalui kategori feodalisme yang lahir dari pengalaman sejarah dan struktur sosial modern. Relasi tersebut beroperasi dalam kerangka epistemologis yang berbeda, di mana otoritas dibangun melalui pengakuan atas ilmu, adab, dan keteladanan moral, serta diarahkan pada tujuan pembentukan manusia yang berkepribadian etis dan bertanggung jawab

secara spiritual. Tuduhan feodalisme terhadap pesantren, oleh karena itu, lebih tepat dipahami sebagai problem epistemik, yakni kegagalan membaca sistem pendidikan Islam dari perspektif nilai dan logika internalnya.

Kesadaran akan perbedaan kerangka epistemologis ini membuka ruang untuk meninjau ulang kritik feodalisme secara lebih proporsional dan reflektif. Alih-alih menolak kritik tersebut secara apriori, diperlukan upaya analisis yang mampu menimbang akar historis, asumsi teoritik, dan keterbatasan pendekatan modern dalam membaca pesantren. Pada titik inilah konsep keberkahan menjadi penting, bukan hanya sebagai nilai spiritual, tetapi sebagai konsep tandingan yang menawarkan kerangka alternatif dalam memahami otoritas, relasi pendidikan, dan legitimasi ilmu dalam tradisi pesantren. Subbab berikutnya akan membahas secara kritis bagaimana tuduhan feodalisme terhadap pesantren dapat dievaluasi kembali melalui perspektif epistemologi keberkahan.

Keberkahan, Otoritas Moral, dan Kesadaran Etis Santri

Dalam pendidikan pesantren, keberkahan ilmu tidak hadir secara otomatis, melainkan muncul melalui proses internalisasi nilai, pembentukan akhlak, dan kesadaran etis santri. Azra (2002) menekankan bahwa pendidikan Islam tradisional tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk pribadi yang beradab dan bertanggung jawab moral, sehingga santri menjadi subjek aktif dalam pencarian ilmu yang bermakna. Dengan demikian, keberkahan menjadi parameter epistemik sekaligus etis yang menilai kualitas ilmu berdasarkan dampak moral dan spiritualnya, bukan sekadar kuantitas pengetahuan yang diperoleh.

Otoritas moral kiai berperan sebagai penjaga keberkahan ilmu, bukan sebagai figur feodal yang menundukkan santri. Dhofier (2011) menjelaskan bahwa kiai dalam tradisi pesantren berfungsi sebagai teladan akhlak dan integritas intelektual, yang legitimasi sosialnya diperoleh dari kesinambungan sanad keilmuan dan pengakuan komunitas, bukan dari kontrol struktural atau kekuasaan personal. Dengan menekankan hubungan pedagogis yang etis, kiai membimbing santri untuk menempatkan ilmu dalam konteks amal dan transformasi moral, sehingga santri belajar menyeimbangkan kognisi, etika, dan spiritualitas.

Wahid (2007) menegaskan bahwa santri adalah subjek aktif yang bertanggung jawab terhadap proses pendidikan dirinya sendiri, termasuk dalam membangun kesadaran akan keberkahan ilmu yang mereka peroleh. Santri tidak pasif menerima otoritas, melainkan mengembangkan *riyāḍah* spiritual, keikhlasan niat, dan disiplin belajar sebagai prasyarat penerimaan ilmu. Dengan pola ini, keberkahan menjadi hasil dari interaksi dialektis antara niat, adab, bimbingan kiai, dan kehendak Tuhan, sehingga setiap subjek pendidikan memiliki peran dalam memastikan ilmu yang diterima tidak hanya sah secara kognitif tetapi juga bermakna secara moral dan spiritual.

Implikasi konseptual dari kerangka ini adalah bahwa pendidikan pesantren mengintegrasikan keberkahan sebagai orientasi epistemologis dan etis. Struktur relasi antara kiai dan santri bukan sekadar hierarki formal, melainkan medium untuk internalisasi nilai dan keberkahan ilmu. Kesadaran etis santri, dikombinasikan dengan otoritas moral kiai, membentuk ekosistem pendidikan yang berorientasi pada transformasi pribadi dan komunitas, sekaligus menegaskan bahwa validitas dan keberkahan ilmu tidak bergantung pada dominasi sosial, tetapi pada kualitas relasi dan kesungguhan spiritual para pelakunya.

KESIMPULAN

Keberkahan merupakan fondasi epistemologis pendidikan pesantren yang menempatkan ilmu bukan sekadar sebagai pengetahuan, tetapi sebagai proses pembentukan moral, spiritual, dan tanggung jawab sosial. Nilai keberkahan diinternalisasikan melalui adab, sanad, khidmah, dan *ta'zīm*, sehingga ilmu diarahkan agar tidak hanya benar secara kognitif, tetapi juga bermanfaat dan bermakna. Relasi kiai-santri menunjukkan karakter epistemik pesantren yang khas. Otoritas kiai dibangun melalui keilmuan, keteladanan moral, dan kesinambungan sanad, sementara santri berperan aktif dalam proses pembelajaran dan internalisasi nilai. Karena itu, penghormatan kepada kiai tidak semata-mata menunjukkan hierarki sosial, tetapi menjadi bagian dari pendidikan yang berorientasi pada keberkahan. Dengan demikian, tuduhan feodalisme terhadap pesantren perlu dipahami secara kritis dan kontekstual. Struktur hierarkis dalam pesantren tidak selalu identik dengan dominasi, karena dapat berakar pada adab, otoritas keilmuan, dan orientasi spiritual. Epistemologi keberkahan pada akhirnya menegaskan keseimbangan antara ilmu, moral, dan ketakwaan sebagai karakter utama pendidikan pesantren.

REFERENSI

- Achmadin, B. Z., Asrori, M., Barizi, A., Haris, A., & Fattah, A. (2024). Dismantling the relationship between Kiai and Santri: A critical review of the social and cultural dynamics of Pesantren in East Java. *Journal of Research and Thought on Islamic Education (JRTIE) Prodi PAI IAIN Pontianak ISSN*, 7(2), 153-185.
- Al-Attas, S. M. N. (1993). *Islam and secularism*. Kuala Lumpur: ISTAC.
- Al-Attas, S. M. N. (1999). *The concept of education in Islam*. Kuala Lumpur: ISTAC.
- Al-Bukhārī, M. Ibn I. (2002). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-‘Ilm. Dār Ṭawq al-Najāh.
- Al-Ghazālī, A. Ḥ. (2005). *Iḥyā’ ‘ulūm al-dīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Munawwir, A. W. (1997). *Kamus Arab–Indonesia*. Pustaka Progressif.
- Al-Rāghib al-Aṣḥānī. (2009). *Mufradāt al-fāz al-Qur’ān*. Dār al-Qalam.
- Al-Zarnūjī, B. (n.d.). *Ta’līm al-muta’allim ṭarīq al-ta’allum*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Azra, A. (2002). *Tradisi pendidikan Islam: Pesantren dan madrasah di Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu

- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1990). *Tafsir sosial atas kenyataan: Risalah tentang sosiologi pengetahuan*. Jakarta: LP3ES.
- Dhofier, Z. (2011). *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Pendidikan*. Jakarta: LP3ES.
- Fahmi, M. C. (2022, October 18). *Langkah mencari keberkahan ilmu*. Lirboyoy. <https://lirboyoy.net/langkah-mencari-keberkahan-ilmu/>
- Fikri, A. R. (2022, October 18). *Ilmu barokah dalam keyakinan seorang santri*. Iqra. <https://iqra.id/ilmu-barokah-dalam-keyakinan-seorang-santri-230661/>
- Hanik, N. (2024). *Studi Deskriptif Relasi Kiai dan Santri di Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek R2 Krapyak Yogyakarta* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- Ibn Manzūr. (2003). *Lisān al-‘Arab* (Juz 10). Dār Ṣādir.
- Ma'arif, S. (2010). Pola Hubungan Patron-Client Kiai dan Santri di Pesantren. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam*, 15(02), 273-296. <https://doi.org/10.19109/td.v15i02.76>
- Masfufah, B., & Husni, M. (2026). Tiga Pilar Epistemologi Pesantren dalam Membentuk Otoritas Keilmuan dan Akhlak. *Jurnal Ilmu Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 75-83.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin, A. (2005). *Kritik dan Transformasi Pesantren dalam Pendidikan Modern*. Yogyakarta: LKiS.
- Nasith, A., Farid, M., & Hasan, M. F. (2025). Pesantren, Piety, and Power: Madurese Ulama and the Shaping of Islamic Educational Institutions. *TARBIYA: Journal of Education in Muslim Society*, 245-262. <https://doi.org/10.15408/tjems.v12i2.52124>
- Notoatmodjo, S. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pamungkas, J. (2026). Relasi Kuasa Dan Hierarki Sosial Di Pesantren: Fenomena Feodalisme Dan Gus-Gusan. *Jurnal Society: Pengamat Perubahan Sosial*, 6(1), 13-29. <https://doi.org/10.35308/jspps.v6i1.14904>
- Syarif, Z. & Gaffar, A. (2025). Pesantren, Barokah, dan Konstruksi Makna (Studi Internalisasi Mitos Barokah dalam Tradisi Pesantren). *Dinamika: Jurnal Studi Kepesantrenan Dan Keislaman*, 3(02), 53-65.
- Wahid, A. (2007). *Islam kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia dan transformasi kebudayaan*. Jakarta: The Wahid Institute.
- Wibowo, H. (2020). Etika Santri kepada Kiai Menurut Kitab Ta'lim Muta'allim di PP. Kotagede Hidayatul Mubtadi-ien Yogyakarta. *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, 4(2), 1-12. <https://doi.org/10.14421/panangkaran.2020.0402-01>